

KAJIAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP KEBERADAAN PERUSAHAAN HPH DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Lucky Zamzami

Jurusan Antropologi FISIP
Universitas Andalas
Email: hafidz_smartillah@yahoo.com

Abstract

This research purposed are to know social impact of foresty management done by HPH Company and influence to community around forest, conducted in Solok Selatan Regency, to know depended level of community to forest and nature resource as basic needs and specifying the target of change which wish to be reached and recommended the best approach for improving benefit of foresty management to community and also participated of community in the effort forest everlasting. This research use qualitatif method with observation, indepth interview and Focus Group Discussion (FGD). Result of researc show that the forest is very important for community as protected area from flood disaster and dryness and as wood source for cummunity. But, until now condition of forest felt having changes or degradation, especially felt from climate change side and quantity and quality water changes. There is a negative responce about HPH company existence, mostly happened because lack of socialization and communications among side. Effort of repair recommended are to develop more condusif relation between government, community with company, with interest many socialization and communications to find best solutions to the all problem.

Key words: *Local Community, HPH Forest Area, Foresty Management, Social Impact*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terpenting penghasil berbagai kayu bulat tropis, kayu gergajian, kayu lapis, pulp, serta hasil kayu tropis lainnya. Lebih dari 54 juta Ha, hutan di Indonesia telah diperuntukkan pemerintah bagi produksi kayu, meski belum semuanya dilakukan pembalakan. Produk kayu telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pendapatan Negara, misalnya pada tahun 1997, nilai ekspor kayu mencapai 5,5 miliar dolar (*sumber data: Bank Indonesia, <http://www.trade port.org>*) atau hampir 10 % dari total pendapatan ekspor. Sumbangan ini diperoleh baik dari hutan alam maupun hutan tanaman.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki kegunaan beraneka ragam, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial budaya. Namun perma salah hutan dewasa ini semakin ramai dibicarakan, salah

satu diantaranya adalah semakin meluasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (Zamzami, 2007).

Dampak dari eksploitasi hutan tentu juga telah dirasakan oleh Bangsa Indonesia, laju degradasi hutan yang mencapai 2 juta ha pertahun merupakan angka yang sangat fantastis, berdampak pada berbagai bencana dengan hilangnya berbagai fungsi jasa alam. Dampak lain yang terasa adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan yang tidak signifikan dengan produk yang sudah dihasilkan oleh hutan itu sendiri. Secara umum tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan masih rendah.

Tujuan industri kehutanan untuk kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang bekerja, peluang ekonomi, serta peluang bagi pengembangan kapasitas utamanya bagi masyarakat sekitar hutan, perlu untuk dieva-

Kajian Dampak Sosial Terhadap ...

luasi. Kebijakan kehutanan menyangkut kewajiban pengelola kehutanan ikut membangun masyarakat dan daerah perlu diterapkan. Pendekatan pembangunan yang tepat sasaran tentunya memerlukan komitmen dan kemampuan semua pihak dalam pelaksanaannya. Keberhasilan maupun kelemahan suatu unit usaha pengelolaan kehutanan, sebaiknya dievaluasi secara berkala agar diperoleh pendekatan yang semakin baik dalam meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta mencegah terjadinya konflik dan hubungan yang saling merugikan.

Dalam Pelaksanaan pengelolaan hutan alam Indonesia melalui Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pemerintah telah menetapkan standar melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain adalah aturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi dasar pengelolaan dan kewajiban dari suatu perusahaan untuk melakukannya sebelum memulai usaha, serta peraturan khusus yang dikeluarkan untuk Departemen Kehutanan Untuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Namun dalam pelaksanaannya, kurangnya pengawasan serta pengertian yang berbeda-beda dan berbagai faktor lainnya menyebabkan sulitnya mencapai standar yang sudah ditetapkan. Untuk memberi rangsangan bagi pihak pemerintah maupun pengusaha dalam penerapan standar pengelolaan yang meminimalkan dampak, skema penghargaan terhadap komitmen dan upaya tersebut dibuat. Sertifikasi produk kehutanan merupakan salah satu pilihan dimana pasar mempengaruhi produsen untuk menghasilkan produk yang lebih bertanggung jawab, baik terhadap kelanjutan usaha, ramah pada lingkungan, serta memberi manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di nagari-nagari sekitar kawasan pengelolaan hutan yang dilakukan salah satu perusahaan HPH di Propinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok Selatan, yaitu PT Andalas Merapi Timber (PT. AMT). Perusahaan HPH tersebut sebagai salah satu perusahaan pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang memiliki visi dan misi terhadap keberlanjutan sumber daya hutan dan masyarakat. Berupaya untuk dapat memehuni standar yang ditetapkan, yaitu melalui standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL) maupun melalui skema sertifikasi voluntary/sukarela dengan standar Forest

Stewardship Council (FSC) berupaya menyeimbangkan kepentingan industri, Lingkungan, dan masyarakat agar tetap lestari. Kajian dampak sosial merupakan sebuah kajian (studi) yang dilakukan untuk memperoleh ukuran dan parameter dampak yang terjadi dari pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perusahaan HPH baik positif maupun negatif. Dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait yang diidentifikasi mengalami dampak dari kegiatan pengelolaan. Kajian ini juga mempertimbangkan dan membandingkan persepsi yang disampaikan oleh masyarakat dengan berbagai data yang ada. Persepsi dan harapan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan pengelolaan menjadi lebih bermanfaat bagi semua pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Pengambilan data lapangan dilakukan secara sistemik melalui wawancara mendalam/ *in-depth interview* (kualitatif). Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat sekitar kawasan hutan, pemerintah pada level nagari hingga kabupaten. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang saling terkait dengan wilayah riset. Fokus penelitian adalah kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan pengelolaan hutan oleh perusahaan HPH. Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan pengenalan akan kondisi lapangan dan informasi awal yang telah diperoleh dari informan kunci (*key informan*).

Hasil dan Pembahasan

Posisi di dalam Hutan lindung menyebabkan area hutan relatif aman dari pembukaan area perkebunan dan pertanian, namun cukup rentan dengan penebangan liar serta klaim wilayah ulayat/adat. Dari luas total tersebut di atas areal hutan terdiri atas: Hutan Primer seluas 18.777 HA, Hutan Bekas tebangan seluas 8.728 HA, Tertutup awan 281 HA dan Buffer Zone 1.054 HA. Sebagai pemilik ijin usaha Pengelolaan Hasil Hutan kayu (IUPHHK), Kegiatan utama perusahaan adalah mengambil kayu di hutan produksi alam. Dengan jumlah tebangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dengan tatacara yang diatur dalam UU. Karena ijin yang diberikan adalah Hutan Produksi Terbatas, maka sesuai dengan

aturan pemerintah, perusahaan hanya boleh menebang pohon jenis komersil dengan diameter di atas 60 cm. Namun dengan adanya aturan baru tentang penebangan, sejak tahun 2009, maka diameter yang dapat dipanen adalah di atas 50 cm.

Nagari-nagari yang berbatasan dengan PT. AMT

Nagari merupakan sebutan bagi pemerintahan setingkat desa di Solok Selatan, walaupun terminologinya cukup berbeda dengan desa secara umum di Indonesia. Nagari digunakan kembali sebagai struktur pemerintahan yang resmi dengan adanya kebijakan setelah era reformasi yang mengembalikan struktur adat nagari dari jaman kerajaan Indonesia dalam pemerintahan. Pada awal pemerintahan era reformasi sekitar tahun 2000an, PT AMT dengan status Hutan Produksi terbatas berada dalam wilayah administrasi sembilan nagari yaitu *Nagari Pakan Rabaa, Nagari Pasir Talang, Nagari Koto Baru, Nagari Alam Pauh duo, Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Malako, Nagari Bidar Alam, Nagari abai, dan Nagari Lubuk Ulang-Aling Selatan*. Berdasarkan hasil Kesepakatan tertanggal 17 Juni 2006 antara PT AMT dengan 9 (sembilan) nagari, disepakati bahwa PT. AMT akan ikut dalam membantu pembangunan nagari di Kabupaten Solok Selatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan area PT AMT, untuk itu PT AMT akan memberikan Fee nagari kepada sembilan nagari sebesar RP 15.000.; / M3 kayu sesuai dengan hasil produksi dari Laporan Hasil Produksi (LHP)

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 2008, Sembilan nagari ini telah dimekarkan menjadi 29 nagari dari 35 nagari yang ada di Solok Selatan. Pemekaran ini masih terus berlanjut dengan terdaftarnya 3 nagari baru yang belum disyahkan. Agak sulit untuk menentukan jumlah populasi dari setiap nagari karena nagari masih terus berkembang, demikian juga dengan batas-batas antar nagari, oleh karena itu jumlah populasi yang ada adalah populasi tiap kecamatan.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sejak jaman kerajaan di Indonesia, di wilayah Solok Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dan Kerajaan Rantau XII Koto, menurut legendanya ke dua kerajaan merupakan bagian dari wilayah

Kerajaan Luhak Tanah Datar atau Kerajaan Pagaruyung di Batu sangkar. Wilayah Kerajaan Sungai Pagu terbentang dari wilayah Sungai Kalu di selatan Hingga Koto baru di Utara, sedangkan Rantau XII Koto dimulai dari Nagari Lubuk gadang hingga ke Abai dan Sungai Kunyit. Beberapa versi berkembang di masyarakat tentang asal usul masyarakat Solok Selatan, namun diyakini bahwa kedatangan kelompok kelompok memang terjadi dalam beberapa gelombang yang kemudian tinggal bersama membentuk kerajaan. Gelombang kedatangan tersebut ada yang berasal dari daerah Jambi memudiki sungai Batang hari, serta rombongan dari Pagaruyung yang juga mengalir melewati sungai Jujan Hingga petang hari bermuara di sungai yang lebih besar yang kemudian dinamakan Sungai Patang Hari atau batang hari (*batang=sungai.*) Gelombang yang berbeda juga telah membentuk kerajaan yang berbeda. Salah satu tanda kedatangan para utusan kerajaan saat ini diabadikan dengan nama masjid di Pasir Talang sebagai pusat kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yaitu Masjid Anam Puluah Kurang Aso, yang melambangkan kedatangan 60 orang utusan tetapi satu orang meninggal dalam perjalanan di Sungai Bangko. Sejak dikuasai Belanda di awal Abad ke 19, wilayah ini kemudian menjadi wilayah Kademangan (Afdeling) yang berpusat di kota Solok sementara kerajaan Rantau XII Koto berada di bawah kewedanaan (onder afdeling) Muara Labuh dengan pimpinan seorang Kontrolir. Setelah Kemerdekaan wilayah Solok Selatan menjadi bagian dari Kabupaten Solok yang kemudian pada 7 Januari 2004 oleh Menteri Hari Sabarno ditetapkan menjadi Kabupaten Solok Selatan.

Sebagai sebuah kabupaten baru, Kab. Solok Selatan masih terus mengalami pemekaran. Hingga saat ini terdapat 7 kecamatan, 35 nagari, serta 141 jorong. Nagari setingkat dengan desa sedangkan jorong setingkat dengan dusun atau RK. Dengan Total populasi berdasarkan sensus 2008 adalah 132 ribu jiwa, terdiri atas 64.792 penduduk laki-laki, dan 67.300 penduduk perempuan. Kepadatan rata-rata 38,96 jiwa per kilometer persegi, dimana wilayah terpadat adalah Kecamatan Sangir 54,93 jiwa per kilometer persegi dan wilayah terjarang adalah Kecamatan Balai Janggo 15,77 jiwa per kilometer persegi. Sekalipun terbilang jarang penduduk, namun ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan bagi masya-

Kajian Dampak Sosial Terhadap ...

rakat terbilang mulai sulit. Hal ini dikarenakan topografi yang berbukit dan berjurang, dimana sebagian besar area merupakan hutan negara, dan area non hutan telah dikelola oleh perusahaan perkebunan sawit dan perkebunan teh.

Pertanian dan perkebunan merupakan kegiatan dan komoditas utama masyarakat Solok Selatan yang berbatasan dengan konsesi PT AMT. Hamparan sawah serta perkebunan teh dapat kita saksikan membentang luas jika melewati jalan utama kabupaten. Dengan susunan pemanfaatan lahan dari persawahan di wilayah datar, tanaman palawija di tegalan, serta kebun/ parak di perbatasan dengan hutan. Padi, lada, sayur, dan kacang-kacangan, merupakan komoditas utama pertanian, sedangkan kayu manis, karet, dan kopi merupakan hasil utama perkebunan. Perkebunan teh dan kelapa sawit umumnya dimiliki oleh perusahaan, dimana masyarakat hanya sebagai pekerja. Selain pertanian dan perkebunan, mata pencaharian lainnya adalah sebagai pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, tentara, polisi, guru, dan pelayanan jasa.

Secara umum ekonomi masyarakat tergolong baik, dilihat dari perumahan didominasi rumah permanen dan semi permanen, pemilikan berbagai fasilitas seperti kendaraan, televisi dan berbagai barang rumah tangga sangat umum dimiliki oleh masyarakat. Rata-rata masyarakat memiliki lahan sendiri baik berupa kebun atau sawah. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis juga terlihat dari kemudahan akses yang menghubungkan pemukiman dengan pasar, baik pasar nagari, pasar kabupaten, Maupun dengan ibukota propinsi Padang. Solok Selatan juga memiliki jalur transport antar propinsi, sehingga perdagangan hasil bumi juga dapat dijual langsung ke Propinsi tetangga Jambi bahkan ke pulau Jawa.

Beberapa Korong (kampung) yang terlihat masih kurang dari sisi ekonomi adalah korong yang berada di pinggir hutan seperti Korong Jujutan, Korong Pamong Ketek, Korong Pamong Gadang, serta sejumlah Korong di Pakan Rabaa Timur. Umumnya masyarakat Korong tersebut bukanlah penduduk asli setempat, tetapi pindahan dari wilayah lain misalnya dari Surian atau Alahan Panjang sekitar 20-40 tahun yang lalu. Dari sejarahnya diketahui bahwa masyarakat yang bermukim tersebut tidak lagi memiliki lahan didaerahnya sehingga mencari daerah baru untuk mendapatkan lahan.

Walaupun masih sebagian kecil masyarakat menggunakan obat-obat tradisional atau pengobatan alternatif sebagai pilihan pengobatan, namun sarana kesehatan seperti Polindes, Puskemas Pembantu, dan Puskesmas selalu ada di setiap nagari. Sedangkan Rumah sakit dibangun di daerah Muara Laboh. Sarana ini dianggap masih kurang karena dalam satu kabupaten hanya ada 1 dokter spesialis dan 24 dokter umum. Penyakit yang paling sering melanda masyarakat adalah ISPA dan diare, hal ini kemungkinan erat berhubungan dengan kebiasaan hidup yang kurang sehat terutama untuk hygiene dan sanitasi. Sangat umum di Solok Selatan untuk membangun pemukiman di sekitar jalan. Baik itu jalan utama Kabupaten maupun jalan kampung. Pusat-pusat pemukiman juga mengikuti topografi wilayah, area yang luas dan datar biasanya dipilih menjadi pusat pemukiman, dan berkembang sebagai pusat pemerintahan. Kesulitan untuk membangun kebun atau unit usaha, adalah ketiadaan akses, tanpa adanya jalan sangat sulit untuk memasarkan hasil bumi dan komoditas lainnya. Beberapa jalan yang dibuka masyarakat membelah hutan, kebanyakan digunakan untuk jalan angkutan kayu atau rotan.

Konsepsi Masyarakat Lokal terhadap Hutan dan Perusahaan HPH

Hasil penelitian melalui metode diskusi dengan kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan di delapan nagari induk diperoleh bahwa pemahaman masyarakat lokal terhadap hutan, dimana hutan dianggap sebagai perlindungan dari berbagai bencana misalnya banjir dan tanah longsor, menjaga agar tanah tidak tererosi dan menjaga iklim mikro. Banjir dan longsor merupakan kejadian yang sering dialami masyarakat Solok Selatan, berkenaan dengan bentuk geografi dan topografi kabupaten yang berbukit dan berjurang, sehingga kekhawatiran masyarakat tentang kejadian ini tentu didasari pengalaman kehilangan sawah dan juga harta benda akibat banjir besar yang membawa berbagai material dan limbah-limbah kayu, masyarakat menyebutnya *Galodo*. Hutan juga sebagai daerah tangkapan air, yang menjadi sumber utama air bersih, dan irigasi. Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai komoditas utama, air memiliki peranan penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Area ini sangat kaya dengan sumber air dikarenakan masih luasnya

area hutan yang dilindungi dengan kondisi yang masih cukup baik (*Jika ditinjau dari pencitraan satelit, maka area berhutan masih merupakan area yang dominan*).

Selain itu, hutan adalah sumber utama kebutuhan kayu masyarakat. Di era tahun 2000-2005, banyak masyarakat menggantungkan hidup dari menjual kayu. Kayu diperoleh dari berbagai bagian hutan di Solok Selatan. Sebagian hutan yang sudah dibuka kemudian dikembangkan menjadi perkebunan. Fenomena ini kemudian berhenti ketika penegakan hukum terhadap illegal logging dilakukan di seluruh Indonesia. Saat ini pengambilan kayu oleh masyarakat hanya boleh dilakukan dengan ijin SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang diberikan oleh Dinas Kehutanan, dengan kriteria terbatas, atau ijin dari nagari bila hanya untuk dipakai sendiri (*Tidak diangkut kelua*). Terbatasnya akses terhadap kayu sesuai peraturan perundangan, menimbulkan keresahan di sebagian masyarakat terutama yang awalnya adalah pengusaha kayu. Keresahan yang dipicu oleh ketiadaan sumber usaha baru/ tidak ingin beralih usaha, serta ketiadaan sumber kayu untuk pembangunan.

Hal yang paling penting menurut konsepsi masyarakat lokal adalah hutan dianggap sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat. Pekerjaan utama yang dominan di masyarakat adalah bertani, namun seringkali hasil pertanian dianggap kurang mencukupi, juga ada masa-masa dimana petani memiliki waktu luang yang cukup besar, misalnya saat tidak sedang menanam atau panen. Waktu luang tersebut biasanya digunakan untuk mencari tambahan penghasilan dengan menjadi buruh atau pekerjaan lainnya. Sebagian masyarakat juga memanfaatkan hutan sebagai tambahan penghasilan, misalnya dengan menjadi pemetik sarang burung walet, menjadi penyedot emas, mengambil rotan, mengambil batu jade, batu koral dan batu indah, mengambil buah seperti jengkol, petai dan durian, mengambil ikan, dan berburu binatang liar.

Konsepsi masyarakat tentang keberadaan perusahaan HPH PT. AMT pada dasarnya adalah sama, dengan beberapa kasus berbeda. Sambutan terhadap beberapa nagari yang berkaitan langsung dengan PT. AMT cukup keras dan cenderung melakukan penolakan, sedangkan nagari-nagari yang tidak terlibat langsung cenderung lebih menerima dan terbuka. Pro dan kontra atas kehadiran PT AMT

juga terjadi di masyarakat dengan inti permasalahan sebagai berikut :

1. Sebagian besar menyatakan tidak mengetahui batas kawasan AMT, sampai seluas apa, serta sampai kapan akan beroperasi
2. Mayoritas masyarakat yang terlewat pengangkutan (Pakan Rabaa, Pasir talang, Lubuk Gadang, Koto Baru, Alam Pauh Duo beserta nagari pemekarannya) menyebutkan hanya mengenal dari truk-truk tronton yang lewat membawa kayu)
3. Sebagian besar masyarakat mengatakan tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.
4. PT AMT sangat kurang melakukan sosialisasi sehingga berbagai asumsi yang buruk beredar di masyarakat.
5. Kecurigaan terhadap perusahaan adalah: Perusahaan telah melakukan penebangan di luar blok tebang, Perusahaan tidak melakukan kewajiban penanaman kembali, perusahaan menebang dengan ukuran yang tidak sesuai peraturan, perusahaan memanipulasi hasil tebang, perusahaan berkolusi dengan pemerintah untuk melakukan kecurangan-kecurangan terutama ijin untuk kayu bisa lewat, serta penentuan batas area tebang.
6. Ketidaktepatan tentang batas serta peta area yang terkesan disembunyikan oleh pihak perusahaan maupun oleh pemerintah.
7. Batas area AMT dianggap aneh karena berada di tengah-tengah hutan lindung, hal ini dianggap tidak lazim untuk diproduksi.
8. Bantuan yang diberikan berupa *fee* nagari serta bantuan lainnya kurang diketahui oleh masyarakat, dan kurang disadari manfaatnya oleh masyarakat.
9. Sistem pengamanan yang dilaksanakan oleh PT AMT dirasakan menimbulkan kecemburuan yang berpotensi menimbulkan konflik.
10. Kecemburuan masyarakat atas ijin yang diberikan kepada Pihak Perusahaan untuk mengelola kayu, sementara masyarakat sendiri sangat sulit untuk memperoleh kayu.

A. Dampak Positif Keberadaan Perusahaan PT. AMT

Dampak positif yang paling dirasakan masyarakat adalah terbukanya akses ke dalam hutan. Akses ini telah memungkinkan masya-

Kajian Dampak Sosial Terhadap ...

rakat untuk melakukan berbagai usaha di hutan. Seperti telah dijelaskan bahwa dalam kawasan hutan PT AMT terdapat berbagai potensi Hasil Hutan Non kayu (NTFP) serta hasil hutan kayu. Saat ini usaha yang sangat marak di masyarakat adalah menambang/ menyedot emas di sungai-sungai yaitu di Sungai Pamong Gadang, Sungai Bangko dan Sungai Batang Hari. Terdapat kurang lebih 300 kelompok penambang di dua sungai yang ada di dalam area konsesi yaitu sungai Bangko dan sungai Kandi, sedangkan sungai Pamong Gadang berada di batas area, dan sungai Batang Hari berhulu di dalam area pula. Jika dalam satu kelompok rata-rata pekerja adalah tujuh orang, maka terdapat sekitar 2.100 orang yang bekerja di dua sungai tersebut. Sedangkan gua-gua di dalam kawasan juga telah memberikan penghasilan tambahan kepada ratusan kepala keluarga di sekitar kawasan. Selain itu, akses ini juga memberi peluang bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh ikan, buah, dan berburu.

Hal ini tentu juga menimbulkan pro dan kontra karena selain memberi penghasilan bagi masyarakat, hal ini juga bisa bertentangan karena penambangan emas dilakukan tanpa ijin, serta perburuan liar dan pengambilan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dapat menurunkan kondisi keanekaragaman hayati dalam kawasan. Untuk itu kerjasama yang baik antar pihak perusahaan dan Dinas terkait sangat diperlukan untuk melakukan kontrol agar kegiatan tidak menimbulkan dampak yang berlebihan. Bantuan pembukaan jalan juga diberikan kepada beberapa jorong untuk sampai ke sentra produksi, hal ini telah membantu masyarakat untuk bisa mengembangkan perkebunan ke area-area yang susah dijangkau. Bantuan berupa *fee* sebesar RP 15.000/ m³ yang diberikan kepada sembilan nagari, dianggap sangat kecil, kurang lebih 25 juta per nagari. Walaupun kecil, namun *fee* tersebut cukup membantu aparat nagari dalam menjalankan program, bahkan beberapa nagari telah memasukkan sumbangan tersebut ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan Nagari.

Di beberapa nagari, bantuan ini menimbulkan keresahan karena pengelolaan yang kurang transparan, misalnya di Nagari Lubuk gadang, masalah *fee* ini kemudian dilaporkan telah disalahgunakan, dan para pengelola *fee* telah diajukan ke pengadilan. Masalah ini timbul bukan karena *fee* tersebut, tetapi karena sistem pengelolaan *fee* yang tidak transparan.

Secara umum program pemberian *fee* telah memberikan manfaatnya walaupun sangat terbatas. Bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi siswa SD, SMTP, dan SMTA, serta Perguruan Tinggi, dilaksanakan selama dua tahun. Bantuan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun lagi-lagi terkendala dengan sistem pemberian bantuan yang dirasakan kurang transparan sehingga hasilnya sangat sedikit dirasakan oleh masyarakat. Dalam diskusi dengan masyarakat, bantuan pendidikan, utamanya tingkat SMTA dan Perguruan Tinggi sangat diharapkan diberikan oleh perusahaan, namun dengan sistem yang lebih baik.

Bantuan pembangunan rumah ibadah berupa mushola telah diberikan kepada masyarakat Korong Jujutan dan Korong Taratak saat ini telah dikembangkan menjadi masjid, merupakan bangunan yang sangat berarti bagi masyarakat. Selain mushola, bantuan dana pengembangan keagamaan juga diberikan kepada mushola atau mesjid di sembilan nagari dalam bentuk dana tunai. Bantuan Dana ini dikelola langsung oleh pengelola masjid atau mushola. Seluruh bantuan ini sangat diharapkan oleh masyarakat namun tidak populer karena tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Dari sisi peluang masyarakat untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan AMT sebenarnya cukup terbuka, namun jumlah yang diserap sangat kecil dengan level yang rendah dan upah yang rendah. Masyarakat yang paling banyak bekerja untuk perusahaan adalah masyarakat Nagari Lubuk Gadang atau seputar Korong Jujutan dan Pamong Gadang. Pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar mulai dari tenaga survey, pengamanan, dan juga pegawai tetap di bidang produksi. Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh karena PT. AMT menggunakan Kontraktor untuk melakukan pekerjaan besar yaitu di bidang produksi. Kontraktor telah mempunyai tenaga kerja sendiri yang didatangkan dari berbagai tempat, sehingga kebutuhan terbesar tenaga kerja kontraktor berasal dari luar, dengan alasan telah bekerja lama dengan perusahaan kontraktor, dan sudah memiliki skill yang diinginkan. Masyarakat sangat menginginkan agar di masa depan, lebih banyak lagi peluang yang diberikan kepada masyarakat, dengan sistem rekrutmen yang lebih terbuka dan dengan upah yang layak.

B. Dampak Negatif Pengelolaan Hutan oleh

Perusahaan HPH

Dampak negatif yang paling disoroti oleh masyarakat sebagai akibat adanya pengelolaan hutan oleh perusahaan adalah kerusakan jalan umum. Pengangkutan log dari TPK ke Pelabuhan teluk Bayur melewati jalan umum atau jalan antar kabupaen dalam Propinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu saja di keluhkan oleh masyarakat. Menurut masyarakat batas tonase jalan dengan kelas yang ada diperkirakan hanya sekitar 8-12 ton, sedangkan tonase dari tronton log yang lewat bisa mencapai 40-60 ton. Ketidaksesuaian angkutan dengan kelas jalan dianggap dapat mempercepat kerusakan jalan. Padahal jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan Solok Selatan dengan ibukota propinsi dan kabupaten serta propinsi lainnya. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana angkutan dengan tonase yang sedemikian besar mendapat ijin untuk melewati jalan umum dengan kelas muatan yang kecil. Masyarakat berharap agar Perusahaan memperlihatkan tanggung jawabnya atas kerusakan yang terjadi di jalan yang dilalui.

Angkutan kayu dari TPK ke pelabuhan Teluk Bayur memang menimbulkan beberapa implikasi negatif. Angkutan log yang melewati Korong Jujutan dengan kondisi jalan sebagian jalan tanah dan sebagian lagi telah diaspal, menimbulkan debu dan kebisingan saat pengangkutan. Pengangkutan dimulai pukul 17.00 hingga malam hari, sekitar 3 bulan dalam setahun. Karena jarak pemukiman yang cukup pendek, maka belum ada indikasi dimana hal ini berpengaruh pada kesehatan. Namun menurut masyarakat Jujutan, kebisingan yang paling mengganggu justru datang dari pengendara sepeda motor, yang masuk ke area penambangan emas untuk menambang karena jumlahnya ratusan dan lewat dengan ngebut setiap waktu. Karena jalan untuk para penambang sama dengan jalan angkutan kayu. Implikasi lainnya adalah aktifitas penambangan dengan jumlah yang besar akan berpengaruh pada kualitas air sungai, dan pencemaran pada air sungai. Belum ada indikasi penggunaan merkuri di sungai, namun pemakaian sturm dan racun untuk ikan seringkali dijumpai.

Berdasarkan letak area yang berada di wilayah hilir dari pemukiman, maka kemungkinan untuk mempengaruhi sumber air masyarakat dari dalam kawasan AMT sangat kecil. Hampir semua sungai yang mengalir di dalam

kawasan AMT telah melewati pemukiman sebelum mengalir ke kawasan. Kecuali untuk sungai Batang hari, dimana semua sungai-sungai tersebut kemudian bermuara di sungai Batang hari. Dari hasil laporan pemantauan erosi di Sungai Kandi dan Bangko ditemukan bahwa tingkat erosi yang ditimbulkan oleh ekstraksi hutan masih berada dalam ambang batas yang dapat ditolerir. Erosi terbesar terjadi di tahun pertama penebangan dan saat curah hujan tinggi. Jika ditilik secara fisik, maka ke dua sungai tersebut masih jernih, kekeruhan akibat hujan dapat cepat menjadi jernih kembali saat hujan telah berhenti.

Namun saat ini kondisi sungai Batang hari sudah sangat berubah dibandingkan 10 tahun lalu. Selain karena degradasi hutan, banyaknya penambang dan penyedot emas dari hulu hingga ke hilir disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya erosi di Sungai Batang Hari, Sungai Bangko dan Sungai Kandi dan Pamong Gadang. Hal ini diakui oleh masyarakat, karena ratusan mesin yang menyedot material dan membuangnya kembali ke sungai membuat air menjadi keruh. Indikasi lain yang mendukung hal ini adalah, jika malam hari dan penyedotan berhenti, kualitas air sungai berangsur membaik, dan jika siang hari ketika aktifitas penyedotan dimulai, air akan keruh kembali. Karena sungai Batanghari merupakan salah satu sungai yang sangat penting, maka kegiatan penambangan dalam kawasan hendaknya dikontrol dengan oleh dinas terkait, dan perusahaan sebaiknya meminimalkan tingkat erosi dengan menerapkan sistem *Reduce Impact Logging* (RIL) dalam proses produksi.

Minimnya pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat serta kurangnya sosialisasi, telah menimbulkan berbagai persepsi buruk masyarakat kepada Perusahaan. Selain itu program sosial yang dilaksanakan selama ini dianggap kurang transparan dan tidak terkontrol. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari program-program yang dilaksanakan AMT adalah :

1. Menimbulkan keresahan atas pelaksanaan kegiatan oleh perusahaan bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana
2. Menimbulkan keresahan antara di masyarakat karena sistem keamanan yang diberlakukan oleh AMT dianggap tidak cocok dengan budaya setempat. Perusahaan dianggap telah membayar orang-orang ter-

Kajian Dampak Sosial Terhadap ...

tentu (baga') untuk mengamankan area dan juga proses operasinya. Sehingga bisa terjadi persaingan tidak sehat antar masyarakat. Usulan masyarakat adalah sebaiknya diserahkan kepada pemuda nagari untuk dapat mengamankan proses pengangkutan sepanjang nagari yang dilewati

3. Menimbulkan kecemburuan social bagi masyarakat yang menginginkan akses ke dalam kawasan, selama ini hanya ada satu akses masuk bagi perusahaan ke dalam area yaitu melalui Nagari Lubuk gadang, sehingga hanya Lubuk gadang yang dianggap memperoleh manfaat terbesar dengan adanya perusahaan.
 4. Distribusi Fee yang kurang transparan, menimbulkan rasa saling curiga antara masyarakat dengan aparat nagari serta antar nagari dengan nagari terhadap penerimaan bantuan AMT karena sistem yang tidak transparan
 5. Kesepakatan yang sudah diperbaharui kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ada kebingungan tentang kesepakatan mana yang masih berlaku
 6. Janji-janji yang dibuat oleh perusahaan dianggap banyak yang belum dipenuhi, misalnya pembuatan jalan dan janji pembayaran fee jalan untuk Ninik mamak.
 7. Sulitnya memperoleh Kayu bahan bangunan, karena tidak ada area yang diperbolehkan bagi masyarakat untuk mengambil kayu selain di kebun dan pekarangan sendiri. Menimbulkan kecemburuan terhadap perusahaan yang dapat menebang kayu di daerah mereka dalam jumlah yang besar.
- C. Faktor Penyebab Hubungan Yang Kurang Harmonis Antara Perusahaan dengan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, masalah-masalah yang terjadi seputar pengelolaan hutan oleh PT AMT, ditemukan beberapa faktor yang diungkapkan oleh masyarakat dan berdasarkan data-data yang ada. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kurang Sosialisasi; Selama ini selain kepada aparat dan tokoh adat, AMT sangat kurang memberikan sosialisasi tentang apa yang akan dan telah dilakukan di dalam Kawasan. Termasuk untuk mensosialisasikan area RKT untuk terbangun setiap tahunnya. Semua Upaya AMT untuk Melaksana-

kan Tahapan TPTI tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga hal-hal positif apapun yang coba dilakukan tidak terekam oleh masyarakat. Terutama yang menyangkut kegiatan lingkungan, produksi, dan program sosial.

2. Kurangnya pelibatan masyarakat; Dalam merancang program sosial dan juga pelaksanaannya belum dilakukan mekanisme yang partisipatif, sehingga program-program yang diluncurkan menjadi kurang populer di masyarakat. Jika menilik dari jumlah besaran dana yang telah dikeluarkan oleh PT AMT untuk membantu masyarakat sudah cukup besar, namun karena pelaksanaannya kurang pelibatan masyarakat maka jumlah dana tersebut tidak nampak. Beberapa kesepakatan yang dibuat lebih kepada pelibatan kalangan elit politik nagari, dan tidak disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat Selain pelibatan dalam program sosial, pelibatan dalam kegiatan perusahaan lainnyapun masih rendah, misalnya jumlah tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat. Jumlah yang kecil dikarenakan pihak AMT menggunakan rekanan/ Kontraktor dalam pelaksanaan produksi, dimana rekanan tersebut telah memiliki tenaga kerja sendiri yang datangkan dari luar wilayah.
3. Kondisi Sosial Politik; Hukum yang majemuk di wilayah Solok Selatan yang diinterpretasikan berbeda-beda menimbulkan kebingungan dalam membangun kesepakatan. Persepsi yang berbeda-beda antara hukum positif/ negara dengan hukum adat sering menimbulkan perbenturan kepentingan. Ketidaksepehaman antara Hutan Negara dengan Hutan Ulayat menimbulkan polemik, dengan pertanyaan siapa yang paling berwenang dalam pengelolaan area. Area AMT yang diklaim sebagai wilayah ulayat Kerajaan Sungai Pagu dan Rantau XII Koto, statusnya oleh negara adalah Hutan Produksi terbatas. Upaya untuk memperjelas batas-batas kawasan juga mendapat hambatan karena dianggap akan membatasi ruang gerak masyarakat. Pemekaran Wilayah juga menjadikan masalah pengelolaan hutan menjadi lebih pelik. Jumlah nagari yang terus bertambah tentunya memiliki konsekuensi dengan jumlah penerima dana maupun masyarakat yang harus didampingi. Kesepakatan awal yang

dibuat dengan Sembilan Nagari dirasakan sudah tidak relevan.

4. Lemahnya Tim Kelola Sosial di perusahaan; Program kelola sosial yang sesungguhnya adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi. Memberikan penguatan atas kapasitas yang dianggap belum dimiliki oleh masyarakat dan perlu dikembangkan. Selama ini yang dilakukan perusahaan bentuk pemberian sumbangan, bukan pemberdayaan seperti yang diharapkan dalam rancangan program Kelola Sosial yang sesungguhnya. Pendekatan memberi bantuan adalah tahap paling bawah dari sisi pemberdayaan, apalagi jika bantuan tersebut tidak didampingi penggunaannya sehingga bisa digunakan untuk hal yang kurang tepat, atau menimbulkan masalah baru (*contoh : masalah fee di Lubuk Gadang*). Walaupun pendanaan memang sangat diperlukan, namun tim yang tangguh sebagai pendamping masyarakat akan sangat memberikan arti bagi masyarakat yang didampingi.
5. Desa Dampingan; Masyarakat yang harus didampingi, berdasarkan peraturan Departemen Kehutanan tentang kelola Sosial. Memiliki kriteria-kriteria tertentu, dan bukannya seluruh masyarakat dalam Kabupaten. Hal ini sangat terkait dengan efektifitas dan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kriteria pemilihan kelompok masyarakat dampingan antara lain adalah: masyarakat yang terkena dampak pengelolaan secara langsung, masyarakat yang sangat tergantung dengan hutan yang dikelola oleh perusahaan, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah, serta beberapa kriteria lain menyangkut kesanggupan perusahaan, mengingat keterbasan kemampuan perusahaan yang berangkutan. Besarnya jumlah masyarakat dampingan, tentu saja sangat berdampak pada besar kecilnya bantuan yang dapat diberikan. Kecilnya bantuan yang diberikan tentunya tidak akan terasa dampaknya oleh masyarakat, padahal tujuan pemerintah untuk program kelola sosial adalah memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Penentuan masyarakat dampingan seharusnya ditentukan oleh pemerintah sesuai hasil diagnostik dan studi. Di sini peran pemerintah juga sangat kuat untuk menjelaskan kepada masyarakat, mengapa nagari atau desa tersebut terpilih sebagai desa dampingan. Dalam Kasus PT AMT, Masyarakat yang masuk dalam kriteria tersebut antara lain adalah : Korong Pamomongan Gadang, Korong Pamong Ketek, Korong Jujutan, Taratak, Nagari Paka Rabaa Timur, dan beberapa nagari atau jorong dan korong yang berada di dekat dan batas kawasan. Selain karena posisi yang dekat dan ketergantungan terhadap hutan yang tinggi, kondisi perekonomian masyarakat di nagari ini lebih memprihatinkan dibandingkan dengan masyarakat lainnya.
6. Rendahnya produksi; Dengan luas area yang ada, dalam daur produksi, PT AMT hanya akan melakukan pemanenan rata-rata per tahun seluas 600 Ha. Dengan status Hutan Produksi terbatas, dimana diameter yang boleh ditebang adalah di atas 60 cm, dan area yang cukup sulit dengan topografi bergelombang. Maka dalam satu tahun, kayu yang dapat diproduksi hanya berkisar 17.000 - 20.000 M3. Jumlah ini relatif kecil untuk bisa membiayai program kelola sosial dengan jumlah populasi yang besar di Solok Selatan. Rendahnya Produksi juga berdampak pada kecilnya inkam perusahaan untuk bisa membentuk tim sosial yang tangguh.
7. Minimnya Solusi atas Kebutuhan Kayu Lokal; Hutan di Solok Selatan sebagian besar berstatus Hutan Lindung dan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kondisi ini cukup menyulitkan masyarakat untuk dapat memenuhi Kebutuhan kayu lokal karena tidak ada atau sangat kecil area hutan yang diperuntukkan bagi masyarakat (Hutan masyarakat atau Hutan dengan status APL). Hal ini tentunya menimbulkan kemarahan dan kecemburuan masyarakat atas Hak Pengelolaan Hutan yang diberikan kepada PT AMT. Adanya Ijin SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang diberikan kepada masyarakat untuk mengambil kayu bagi kebutuhan domestik, dianggap hanya menyulitkan masyarakat dan menjadikan biaya menjadi mahal.
8. Kurangnya Kerjasama dengan pemerintah Daerah; Dalam banyak kasus antara Perusahaan dan masyarakat, pemerintah bisa menjadi mediator yang menjembatani kesenjangan persepsi antar ke dua belah pihak. Terutama untuk memberikan pen-

Kajian Dampak Sosial Terhadap ...

jelasan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga sebaiknya menjadi mediator yang bijak dalam menentukan kesepakatan-kesepakatan yang cukup adil bagi kedua belah pihak. Kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, menyebabkan berbagai permasalahan tidak diselesaikan secara tuntas dan cenderung tidak kondusif. Hal ini tentunya akan menyulitkan terbangunnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat serta pemerintah.

Simpulan

Secara umum, hal yang harus diperbaiki perusahaan HPH seperti PT. AMT adalah membangun hubungan yang lebih kondusif dengan pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pendekatan yang lebih persuasif sebaiknya dilakukan melalui analisis para pihak. Secara khusus beberapa upaya yang disarankan untuk dilakukan perubahan oleh pihak perusahaan adalah isu jalan dan pencemaran, isu erosi dan banjir, isu masalah sosial, isu lahan, isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan karyawan dan isu kebutuhan kayu lokal.

Diperlukan suatu ukuran untuk dapat menilai progress dari perbaikan pengelolaan yang dilakukan. Ukuran ini akan menilai apakah upaya yang dilakukan cukup efektif, dan bermanfaat serta benar-benar melakukan perubahan ke arah yang diinginkan.

Rujukan

- Alland, JR, Alexander. 1975. "Adaptation" dalam *Annual Review of Anthropology* Vol. 4, 59-73
- Bennet, John, W. 1976. *The Ecological Transition: Cultural Anthropological and Human Adaptation*. Oxford: Pergamon Press
- Bennet, John, W. 1980. "Human Ecology as Human Behaviour: A Normative Anthropology of Resource Use and Abuse dalam Irwin Altman, Amos Rapport and Joachim F. Wohlwill (eds)". *Human Behaviour and Environment*

Advances in Theory and Research (Vol 4: Environment and Culture). New York: Plenum Press. 243-277.

Ellen, Roy F. 1982. *Environment, Subsistence and System: The Ecology of Small Scale Social Formations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. 2002. Volume 22 Nomor 2-4. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka. 2009

LSM WARSI. 2008. *Laporan Hasil kajian Sosial dan Biodiversity Nagari Seputar Kawasan AMT*. Jambi: LSM WARSI

LSM WARSI. 2007. *Laporan Potensi Kawasan Hutan Sekitar Area Konsesi PT AMT*. Jambi: LSM WARSI

Moran, Emilio F. 1978. *Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology*. Colorado: Westview Press

TFT Semarang dan LSM WARSI Jambi. 2007. *Laporan hasil kegiatan Participatory Conservation Planning*. Semarang: Kerjasama TFT dan Warsi.

TFT Semarang. 2009. "Kajian Dampak Sosial terhadap Keberadaan PT. AMT di Kabupaten Solok Selatan". *Laporan yang tidak dipublikasikan*

Von Liebenstein, G.W. 1995. "Adaptation and Development: Interdisciplinary Perspective on Subsistence and Sustainability in Developing Countries" dalam Kusnaka Adimihardja dkk. *Adaptation and Development: Interdisciplinary Perspective on Subsistence and Sustainability in Developing Countries*. UPT Indonesia Resource Center for Indigenous Knowledge. Bandung: Padjajaran University.

Zamzami, Lucky. 2007. "Konsepsi dan Nilai Budaya Masyarakat Lokal terhadap Pelestarian Kawasan Hutan". *Jurnal Puitika* Volume 7 No. 1. April 2007. 92-102.